

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konsep dan Landasan Teori

2.1.1 Konsep Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat. Ekonomi juga melibatkan analisis tentang bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.

Ekonomi politik internasional adalah disiplin ilmu yang mengkaji interaksi antara faktor politik dan ekonomi dalam skala global. Bidang Ekonomi Politik Internasional (IPE) mengkaji bagaimana politik membatasi pilihan-pilihan ekonomi, baik dari segi kebijakan pemerintah maupun pilihan-pilihan yang dibuat oleh individu atau kelompok sosial. Selain itu, Ekonomi Politik Internasional (IPE) juga mengkaji bagaimana kekuatan ekonomi memotivasi dan membatasi pilihan politik, seperti perilaku pemilih, lobi politik oleh serikat pekerja atau korporasi, atau kebijakan internal atau eksternal pemerintah¹.

Dalam kajian Political Economy (IPE), teori-teori ekonomi seperti realisme, liberalisme, dan Marxisme sering digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena ekonomi politik internasional. Namun, International Political Economy (IPE) juga mengkritisi pendekatan ekonomi yang terlalu mengutamakan interaksi aktor-aktor dalam pasar ekonomi dan menganggap politik hanya sebagai “penghalang” dalam mencapai kebijakan yang optimal. Bidang Ekonomi Politik Internasional (IPE) menekankan pentingnya

¹ Balaam, D. N., & Dillman, B. (2015). Introduction to International Political Economy. Routledge.

negara sebagai aktor politik utama dalam sistem internasional, berfokus pada kepentingan keamanan nasional dan kedaulatan mereka dalam pembuatan kebijakan².

Konsep ruang lingkup dalam ekonomi politik internasional mengacu pada wilayah geografis atau tematik tertentu yang menjadi subjek analisis. Ruang lingkup ini mencakup berbagai aspek, antara lain perdagangan internasional, keuangan global, penanaman modal asing, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, dan sebagainya. Konsep ruang lingkup memainkan peran penting dalam memahami interaksi antara faktor politik dan ekonomi di tingkat global.

Contoh yang dapat diambil adalah dalam konteks analisis ekonomi politik internasional, fokus penelitian dapat diarahkan pada hubungan perdagangan antar negara, yang melibatkan kebijakan proteksionisme atau liberalisasi perdagangan³. Ruang lingkupnya juga dapat mencakup studi kebijakan moneter dan keuangan global, seperti peran lembaga keuangan internasional dalam mengatasi krisis keuangan global.

Signifikansi konsep ruang lingkup dalam ekonomi politik internasional terletak pada kemampuannya untuk memahami seluk-beluk interaksi antara faktor politik dan ekonomi di tingkat global. Dengan mempertimbangkan ruang lingkup yang relevan, analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam dan mendalam.

2.1.2 Konsep Food Security

Asal-usul konsep ketahanan pangan dapat dikaitkan dengan kontribusi berpengaruh dari Thomas Malthus dan Amartya Sen. Malthus menguraikan hubungan antara perluasan populasi dan kemungkinan bahaya kelaparan, sehingga menekankan pentingnya penyediaan pangan yang cukup. Dalam karya seminalnya yang berjudul "Poverty and Famines: An Essay

² Strange, S. (1971). *International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect*. *International Affairs*, 46(2), 304-315.

³ Gilpin, R. (2001). *Political Economy of International Relations*. Princeton University Press.

on Entitlement and Deprivation" (1981), Sen membawa perhatian pada pentingnya kepemilikan pangan dalam konteks kelaparan, menegaskan korelasi yang kuat antara kelaparan dan kemiskinan.

Konsep ketahanan pangan mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu⁴. Akademisi yang dihormati seperti Peter C. Timmer dan David Dawe telah melakukan penyelidikan ilmiah yang signifikan berkaitan dengan masalah ketahanan pangan, dengan fokus khusus pada wilayah Asia. Belakangan ini, telah terjadi peningkatan pengakuan akan perlunya mengatasi kekhawatiran terkait ketersediaan, aksesibilitas⁵, dan penggunaan pangan untuk menjamin ketahanan pangan.

Pemerintah dan organisasi internasional telah banyak terlibat dalam pengembangan kebijakan dan implementasi langkah-langkah yang ditujukan untuk mengelola ancaman keamanan pangan secara efektif dan mempromosikan kolaborasi pada skala regional dan dunia.

Singkatnya, gagasan ketahanan pangan telah mengalami kemajuan bertahap, berkat kontribusi berharga yang diberikan oleh para sarjana terkenal termasuk Malthus, Sen, Timmer, dan Dawe. Ketahanan pangan merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai dimensi seperti ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan ketahanan pangan secara efektif, sangat penting untuk mendorong kolaborasi di tingkat regional dan internasional.

Berikut adalah beberapa definisi food security menurut para ahli, beserta referensinya:

1. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations): "Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and

⁴ Malthus, T. (1798). A scholarly analysis of the Principle of Population. The source was obtained from the website <https://www.gutenberg.org/files/4232/4232-h/4232-h.htm>.

⁵ Sen, A. (1981). The topic of discussion pertains to the issues surrounding poverty and famines.

nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life"⁶

2. World Food Summit: "Food security is a condition characterized by the availability of food, the access of individuals to food in sufficient quantity and quality to meet their dietary needs, and the stability of this access over time"⁷
3. USDA (United States Department of Agriculture): "Food security is a household-level economic and social condition of having reliable access to sufficient quantity of affordable, nutritious food"⁸.
4. IFPRI (International Food Policy Research Institute): "Food security is a state where all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life"⁹.

Bahwa ketahanan pangan mencakup faktor ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Ketersediaan pangan memastikan bahwa pasokan pangan cukup, aman, beragam, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk¹⁰. Distribusi memastikan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses pangan dalam jumlah yang cukup, berkualitas, berkelanjutan, dan terjangkau.

Tujuan dari pembentukan konsep food security adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi makanan mereka untuk kehidupan yang aktif dan

⁶ "The State of Food Insecurity in the World" (FAO, 1996).

⁷ "World Food Summit Declaration and Plan of Action" (World Food Summit, 1996)

⁸ "Household Food Security in the United States in 2018" (USDA, 2019).

⁹ "Global Food Policy Report 2019" (IFPRI, 2019).

¹⁰ Rossi Prabowo (2010), "Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia", Jurnal Universitas Wahid Hasyim Semarang.

sehat. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi masalah kelaparan, malnutrisi, dan ketidakamanan pangan di tingkat global.

Ruang lingkup konsep food security mencakup empat pilar utama¹¹, yaitu:

1. Ketersediaan pangan: Memastikan bahwa produksi pangan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan populasi. Hal ini melibatkan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
2. Stabilitas pasokan pangan: Memastikan bahwa pasokan pangan stabil dan tidak terganggu oleh perubahan iklim, bencana alam, atau faktor lain yang dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan.
3. Aksesibilitas pangan: Memastikan bahwa semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi yang memadai untuk mendapatkan pangan yang cukup. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat sistem distribusi pangan yang inklusif.
4. Pemanfaatan pangan: Memastikan bahwa pangan yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik oleh individu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Hal ini melibatkan pendidikan gizi, akses ke air bersih, sanitasi yang baik, dan praktik pangan yang sehat.

Sehingga ruang lingkup konsep food security meliputi aspek produksi pangan, stabilitas pasokan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan. Konsumsi mengarahkan pola pemanfaatan pangan nasional agar memenuhi standar mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalan.

¹¹ Global Food Crisis and Food Security, diakses melalui:
<https://aptsis.org/uploads/normal/2022%20News%20and%20Event/Food%20Crisis/Global%20Food%20Crisis%20and%20Food%20Insecurity.pdf>

Namun demikian, kondisi ketahanan pangan di negara kita masih lemah. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih besarnya jumlah penduduk yang rentan, yaitu penduduk yang tingkat konsumsinya kurang dari 90% dari anjuran 2.000 kkal/kap/hari, dan penduduk yang sangat rentan, yaitu penduduk yang tingkat konsumsinya kurang dari 70% dari anjuran, yang masing-masing berjumlah 36,85 juta dan 15,48 juta jiwa pada tahun 2002. Jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi juga cukup besar, yaitu 5,02 juta dan 5,12 juta pada tahun 2002 dan 2003.

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi food security, beserta referensi yang membahas tentang hal tersebut¹²:

1. Ekonomi: faktor ekonomi seperti harga pangan, stabilitas pasokan pangan, dan ketersediaan sumber daya alam mempengaruhi food security.
2. Politik: kebijakan politik dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi food security.
3. Sosial: faktor sosial seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat urbanisasi mempengaruhi food security. Referensi: "Food Insecurity and the Social Determinants of Health".
4. Ekologi: perubahan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat mempengaruhi food security.
5. Geopolitik: faktor geopolitik seperti perang dan konflik, serta perubahan iklim mempengaruhi food security

¹² "The State of Food Security and Nutrition in the World 2019"

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **Kerjasama Ketahanan Pangan Indonesia-ASEAN Melalui Kerangka Asean Integrated Food Security Studi Kasus: Kebijakan Impor Beras Dari Vietnam 2018-2022** , skripsi ini merujuk pada penelitian terdahulu sehingga dapat dijadikan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dengan yang lainnya untuk mengetahui hal tersebut, beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis referensi yakni berjudulkan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fauzi Ridwan berjudul “Kerjasama Indonesia dan Vietnam Dalam Memenuhi Kebutuhan Beras di Indonesia” dalam bentuk tesis mengungkapkan pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Vietnam dalam memenuhi kebutuhan beras di Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mencegah terjadinya krisis pangan di Indonesia.

Riset yang dilakukan Achmad menunjukkan bahwa impor beras dari Vietnam ke Indonesia selama periode 2013 hingga 2018 memberikan manfaat yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan beras di Indonesia. Kebijakan impor beras bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan di Indonesia dan menjaga stabilitas politik dalam negeri. Namun penelitian ini belum memberikan gambaran secara detail mengenai kebijakan impor beras pada masa pemerintahan Jokowi yang menjadi fokus utama penelitian penulis.

Penelitian penulis terutama berfokus pada kebijakan impor beras pada masa kepemimpinan Jokowi dan perbedaannya dengan kerjasama impor beras dengan Vietnam yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah Jokowi dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan impor beras sebagai komponen strategis dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

Oleh karena itu, meskipun kedua penelitian tersebut membahas tentang impor beras dari Vietnam ke Indonesia, namun keduanya memiliki fokus yang berbeda. Riset yang dilakukan Achmad lebih fokus pada keseluruhan kerjasama antara Indonesia dan Vietnam, sedangkan riset penulis secara khusus mengkaji kebijakan impor beras pada masa pemerintahan Jokowi. Kedua kajian tersebut memiliki nilai dan relevansi yang berbeda dalam memahami tantangan ketahanan pangan di Indonesia.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Septa Vera Anggraini dalam bentuk skripsi berjudul **KEBIJAKAN IMPOR BERAS DARI VIETNAM 2014-2018 : TINJAUAN EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL**. Skripsi ini mengkaji fluktuasi kebijakan impor beras di Indonesia dari Vietnam pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan impor beras mengalami penurunan yang signifikan dan terjadi tingkat impor yang tinggi selama periode yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan hubungan positif antara Vietnam dan Indonesia yang menyebabkan peningkatan kegiatan impor secara signifikan yang didorong oleh alasan ekonomi.

Riset yang dilakukan Septa menunjukkan bahwa kebijakan impor beras Indonesia dari Vietnam dipengaruhi oleh beberapa faktor¹³. Pertama, Indonesia menghadapi kebutuhan internal yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri, terutama saat krisis ketika stok beras nasional menipis. Selain itu, kerangka kerja dan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Vietnam memudahkan proses pengambilan keputusan impor beras sehingga lebih efisien. Sejak tahun 2009, terdapat kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Vietnam yang terus diperluas terkait kerjasama impor beras.

Selain itu, industri beras di Vietnam memiliki keunggulan komparatif yang signifikan karena keterjangkauannya, sejalan dengan teori keunggulan komparatif. Indonesia sebagai

¹³ Septa Vera Anggraini. Kebijakan Impor Beras dari VIETNAM 2014-2018 : TINJAUAN EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL.

negara agraris dengan jumlah penduduk besar yang mayoritas mengandalkan beras sebagai makanan pokok, menganggap impor beras dari Vietnam sebagai langkah yang dapat dibenarkan.

Dalam penelitian ini, Septa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan impor beras Vietnam ke Indonesia dan menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam penurunan dan peningkatan kegiatan impor selama periode pemerintahan Jokowi. Kajian ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika hubungan ekonomi antara Indonesia dan Vietnam dalam konteks kebijakan impor beras. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan dan manfaat kebijakan impor beras dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Patunru, Arianto, Ilman, Assyifa Szami dalam bentuk *working paper* berjudul *Political Economy of Rice Policy in Indonesia: A Perspective on the ASEAN Economic Opportunity*. Tulisan ini membahas analisis permasalahan beras di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Beras berperan penting sebagai sumber pangan utama di daerah, namun tingginya harga menjadi tantangan bagi rumah tangga karena sebagian besar anggaran mereka dialokasikan untuk membeli pangan.

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam mengatur sektor beras karena terbatasnya data yang andal, yang memengaruhi keputusan terkait impor dan intervensi lainnya. Harga beras dalam negeri yang meningkat sejak Krisis Beras Dunia pada tahun 2008, berdampak pada potensi kemiskinan ekstrem dan peningkatan gizi buruk di kawasan tersebut, terutama bagi negara-negara pengimpor seperti Filipina.

Sejarah kebijakan pangan di Indonesia mencerminkan upaya mencapai kemandirian produksi beras, melalui berbagai prakarsa yang dilakukan pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Pencapaian swasembada diwujudkan pada tahun 1984-1985 dengan Revolusi

Hijau, namun dengan biaya tinggi dan efek jangka pendek. Namun pada awal tahun 1990-an dan pada masa Krisis Finansial Asia pada tahun 1998, Indonesia terpaksa mengimpor beras dalam jumlah yang signifikan karena beberapa faktor seperti gagal panen, El Nino, dan gagalnya Proyek Mega Beras.

Studi ini juga menyelidiki faktor politik dan ekonomi yang berperan dalam mempengaruhi kebijakan beras di negara-negara ASEAN. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina yang merupakan importir beras sedang berjuang untuk mencapai swasembada beras. Di sisi lain, negara pengekspor bersih seperti Vietnam dan Thailand berkonsentrasi pada produksi beras premium, yang dapat berdampak pada pasar beras dan negara pengimpor bersih.

Negara penerima impor tersebut dapat menerapkan kebijakan proteksionis untuk mengurangi ketergantungannya pada pasar beras internasional yang tidak stabil. Krisis Beras Global pada tahun 2008 semakin memperkuat tekad mereka untuk tidak bergantung pada pasar internasional untuk memastikan ketahanan pangan, yang mengakibatkan penolakan jangka panjang terhadap liberalisasi perdagangan beras, sebagaimana dibuktikan dengan dikeluarkannya beras dari perjanjian perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai swasembada beras lebih lanjut dipengaruhi oleh tidak adanya prioritas dalam liberalisasi perdagangan beras di tingkat legislatif, eksekutif, dan otoritas persaingan independen. Kesepakatan MEA tentang perdagangan beras juga tidak menjadi pembahasan mendalam di DPR RI.

Paper ini membahas isu dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, terkait beras, serta faktor politik dan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan dan langkah yang diambil masing-masing negara dalam mengatasi masalah tersebut.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Renny Miryanti, Sri Wijayanti, Kholifatus Saadah, Ayu Agustiningstih dalam bentuk *Working Paper* yang berjudul *The Role of ASEAN through ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework in Achieving Indonesia's Food Security*. Makalah ini dimulai dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai ketahanan pangan.

Penulis selanjutnya membahas kerangka kerja ASEAN Integrated Food Security (AIFS) dan potensinya dalam mengatasi tantangan tersebut. Inisiatif Ketahanan Pangan Terintegrasi ASEAN (AIFS) didirikan pada tahun 2009 dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan di kawasan ASEAN melalui langkah-langkah seperti meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan aksesibilitas pangan.

Penulis berkeyakinan bahwa kerangka kerja AIFS memainkan peran penting dalam menjawab tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Kerangka kerja tersebut menyediakan platform untuk kolaborasi dan koordinasi regional dalam mengatasi masalah ketahanan pangan, yang sangat bermanfaat bagi negara-negara seperti Indonesia yang menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai swasembada ketahanan pangan. Makalah ini juga menyoroti banyak inisiatif spesifik dalam kerangka AIFS yang dapat memberikan manfaat bagi Indonesia.

Misalnya, APTERR (Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga) bertujuan untuk menyediakan cadangan beras darurat kepada negara-negara ASEAN, dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan Indonesia terhadap bencana alam yang signifikan.

Selain itu, penulis membahas banyak tantangan yang perlu diatasi agar kerangka kerja AIFS dapat berkontribusi secara efektif terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Misalnya,

pentingnya peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan di sektor pertanian, serta infrastruktur yang mendukung penyimpanan dan transportasi pangan, dapat ditegaskan.

Makalah ini diakhiri dengan menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi regional yang berkelanjutan dalam mengatasi masalah ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Penulis menegaskan bahwa kerangka AIFS memainkan peran penting dalam konteks ini, dan sangat penting bagi Indonesia untuk terus berpartisipasi aktif dalam kerangka ini untuk mencapai tujuan ketahanan pangan.

Secara keseluruhan, makalah ini memberikan wawasan berharga tentang peran potensial kerangka kerja AIFS dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan di Indonesia, sekaligus menyoroti pentingnya kerja sama regional dalam mencapai ketahanan pangan di kawasan ASEAN.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Ramon Clarete, Lourdes Adriano dan Amelia Esteban dalam bentuk *working paper* yang berjudul *Rice Trade and Price Volatility: Implications on ASEAN and Global Food Security*. Makalah ini menganalisis hubungan antara perdagangan beras dan volatilitas harga, serta implikasinya terhadap ketahanan pangan di kawasan ASEAN dan global.

Tulisan ini juga menjelaskan bahwa beras berperan penting sebagai makanan pokok di banyak negara, termasuk ASEAN, dan fluktuasi harga beras dapat berimplikasi signifikan terhadap ketahanan pangan, terutama bagi populasi yang rentan. Penulis menggunakan data dari tahun 1980 hingga 2016 untuk menganalisis hubungan ini dan menemukan bahwa perdagangan beras dapat berkontribusi pada stabilisasi harga dan mengurangi volatilitas, namun dengan batasan tertentu. Berbagai faktor seperti gangguan pasokan, kesulitan perdagangan dan kurangnya transparansi di pasar berdampak signifikan terhadap fluktuasi harga.

Volatilitas harga beras dapat menyebabkan kerawanan pangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk belanja pangan.

Selain itu, volatilitas harga dapat menghambat investasi di sektor pertanian, sehingga mempengaruhi ketahanan pangan di masa depan. Untuk memerangi volatilitas harga, penulis menganjurkan upaya terkoordinasi di tingkat nasional dan internasional. Dalam tulisan ini, beberapa langkah kebijakan yang direkomendasikan antara lain peningkatan transparansi pasar, pembatasan perdagangan, dan pembangunan cadangan pangan darurat.

Makalah ini berfokus pada pentingnya ketahanan perdagangan beras dalam mencapai pangan di kawasan ASEAN dan global. Perdagangan beras memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pasokan pangan yang cukup. Namun, untuk itu diperlukan koordinasi dan langkah kebijakan yang tepat untuk mengatasi fluktuasi harga dan mendorong ketahanan pangan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Secara keseluruhan, makalah ini memberikan wawasan berharga tentang korelasi antara beras yang diperdagangkan dan penurunan harga, serta dampaknya terhadap ketahanan pangan di kawasan ASEAN dan global. Tulisan ini membahas tentang pentingnya upaya koordinasi dan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi fluktuasi harga dan meningkatkan ketahanan pangan, khususnya bagi kelompok penduduk rentan.

2.3 Teori

2.3.1 Teori Keunggulan Komparatif

Teori komparatif adalah teori yang dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1821 dalam bukunya yang berjudul "*Principles of Political Economy and Taxation*". Teori ini mengemukakan bahwa negara-negara sebaiknya terlibat dalam perdagangan berdasarkan prinsip keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing negara. Keunggulan

komparatif mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang atau jasa dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain¹⁴.

Dalam kerangka teori komparatif, Ricardo mengambil contoh dua negara, yaitu Portugal dan Inggris, yang menunjukkan adanya keunggulan komparatif dalam produksi barang tertentu. Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa Portugal menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi pada sektor produksi anggur, sementara Inggris menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi pada sektor produksi kain.

Berdasarkan teori ini, kedua negara akan memperoleh keuntungan apabila mereka melakukan pembagian kerja dan mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Konsekuensinya, Portugal akan berkonsentrasi pada produksi anggur, sedangkan Inggris akan fokus pada manufaktur tekstil.

Teori komparatif didasarkan pada beberapa asumsi, termasuk adanya persaingan sempurna, pemanfaatan penuh semua faktor produksi, imobilitas tenaga kerja dan modal lintas negara, perdagangan luar negeri yang seimbang, dan harga pasar yang mencerminkan biaya riil barang yang diproduksi. Namun asumsi tersebut dianggap tidak realistis dan jauh dari kondisi di negara berkembang.

Contoh tersebut menggambarkan ketidaksesuaian antara asumsi penuhnya penggunaan faktor produksi dengan realitas yang terjadi di negara-negara berkembang, di mana terdapat tingkat rangsangan yang tinggi dan sumber daya yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, asumsi bahwa harga pasar mencerminkan biaya riil tidak selalu akurat karena adanya monopoli dan subsidi pemerintah yang mempengaruhi harga produk.

¹⁴ Kalim Siddiqui, "David Ricardo's Comparative Advantage and Developing Countries: Myth" diakses melalui https://pure.hud.ac.uk/files/14132571/David_Ricardo_s_Comparative_Trade_Theory.pdf

Dalam praktiknya, teori komparatif juga menghadapi tantangan dalam menghadapi kenyataan bahwa perdagangan internasional melibatkan berbagai faktor yang kompleks dan dinamis. Untuk menggunakan gagasan keunggulan komparatif secara efektif, negara-negara dapat melakukan serangkaian tindakan strategis, yang diuraikan di bawah ini:

1. Identifikasi keunggulan komparatif merupakan tugas penting bagi negara-negara, karena memerlukan identifikasi wilayah tertentu di mana mereka menikmati keunggulan relatif atas negara lain. Pencapaian tujuan ini dapat difasilitasi melalui analisis berbagai komponen produksi, pengujian teknologi yang digunakan, dan evaluasi biaya produksi relatif dalam sektor-sektor tersebut.
2. Prinsip spesialisasi dalam produksi menunjukkan bahwa negara-negara, setelah mengakui keunggulan komparatifnya, harus memfokuskan sumber daya dan upayanya pada produksi barang atau jasa dalam bidang-bidang khusus ini. Negara dapat meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan output dengan mengalokasikan sumber daya dan tenaga kerja ke wilayah di mana mereka memiliki keunggulan komparatif.
3. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara dengan keunggulan komparatif yang berbeda untuk terlibat dalam pertukaran ekonomi, sehingga memungkinkan mereka memperoleh keuntungan bersama dari kekuatan mereka sendiri. Suatu negara dengan keunggulan komparatif dalam produksi komoditas tertentu memiliki kemampuan untuk terlibat dalam ekspor produk tersebut ke negara lain yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi komoditas yang berbeda. Akibatnya, kedua negara bisa mendapatkan keuntungan dari terlibat dalam perdagangan tersebut.
4. Kebijakan perdagangan dapat digunakan oleh negara-negara untuk memfasilitasi penerapan gagasan keunggulan komparatif. Hal ini dapat mencakup pengurangan atau

penghapusan tarif, mitigasi hambatan non-tarif, dan fasilitasi perdagangan. Kebijakan ini akan memfasilitasi perluasan perdagangan internasional dan memperkuat penerapan gagasan keunggulan komparatif.

Namun demikian, sangat penting untuk menyadari bahwa pemanfaatan gagasan keunggulan komparatif tidak selalu merupakan proses yang mulus dan mungkin menghadapi banyak masalah. Berbagai isu, termasuk disparitas faktor produksi, divergensi dalam kebijakan perdagangan, dan disparitas dalam sistem perdagangan global, dapat memengaruhi kapasitas suatu negara untuk melaksanakan teori tersebut secara mahir.

Oleh karena itu, sangat penting bagi negara-negara untuk terus menilai dan memodifikasi pendekatan mereka dalam menerapkan prinsip keunggulan komparatif. Upaya kolaboratif dan kolaborasi global juga dapat berkontribusi untuk mengatasi hambatan potensial dalam pelaksanaan perdagangan internasional, sehingga mendorong pertukaran barang dan jasa yang lebih mulus dan saling menguntungkan antar negara.

Konsep teori keunggulan komparatif,¹⁵ yang merupakan teori ekonomi yang menjelaskan bagaimana negara-negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan, bahkan jika satu negara dapat memproduksi semua barang secara lebih efisien daripada negara lain. Teori ini menunjukkan bahwa negara-negara harus berspesialisasi dalam memproduksi barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif, yang berarti mereka dapat memproduksi dengan biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.

Hal ini memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan output dan konsumsi mereka secara keseluruhan dengan memperdagangkan barang-barang yang memiliki keunggulan dalam memproduksi dengan negara lain. Dalam kasus kebijakan impor beras Indonesia, ini berarti bahwa jika Indonesia dapat mengimpor beras dari Vietnam dengan biaya yang lebih

¹⁵ Adam Haves (2022) "What is Comparative Advantage ?"
<https://www.investopedia.com/terms/c/comparativeadvantage.asp>

rendah daripada memproduksinya di dalam negeri, maka Indonesia harus mengkhususkan diri pada barang-barang lain yang memiliki keunggulan komparatif dan mengimpor beras dari Vietnam.

Kerangka kerja ASEAN Integrated Food Security (AIFS) bertujuan untuk mempromosikan kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN dalam hal ketahanan pangan, termasuk promosi perdagangan produk pangan. AIFS mengakui pentingnya keunggulan komparatif dalam mempromosikan perdagangan dan ketahanan pangan di antara negara-negara anggota ASEAN.

Dalam hal kebijakan impor beras Indonesia, kerangka kerja AIFS menyediakan platform bagi Indonesia dan Vietnam untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan yang menguntungkan kedua negara. Indonesia dapat mengimpor beras dari Vietnam dengan biaya yang lebih rendah daripada memproduksinya di dalam negeri, sementara Vietnam dapat memperoleh manfaat dari peningkatan ekspor beras ke Indonesia.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kebijakan perdagangan juga harus mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap produsen dan konsumen dalam negeri. Kebijakan impor beras Indonesia harus memperhitungkan potensi dampak terhadap petani beras dalam negeri dan memastikan bahwa mereka tidak terdampak secara tidak adil oleh peningkatan impor. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut juga harus memastikan bahwa harga beras tetap terjangkau oleh konsumen berpenghasilan rendah yang mengandalkan beras sebagai makanan pokok.

2.3.2 Teori Ketahanan Pangan

Teori ketahanan pangan berfungsi sebagai kerangka konseptual yang digunakan untuk analisis dan pemeriksaan berbagai elemen yang berdampak pada ketahanan pangan suatu bangsa, wilayah geografis, atau individu. Kriteria tersebut di atas mencakup unsur-unsur

seperti keberadaan dan jumlah makanan yang banyak, kemudahan memperolehnya, konsistensinya sepanjang waktu, dan strategi yang digunakan untuk mengawasi distribusi dan pengendaliannya.

Teori ketahanan pangan berbasis aset merupakan aspek mendasar dari kerangka kerja ini, menyoroti pentingnya elemen produktif seperti pertanian, modal, dan keterampilan dalam mencapai ketahanan pangan. Berbagai elemen sosial, ekonomi, dan politik, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan iklim, konflik, dan ketahanan pangan, memberikan pengaruh terhadap penentuan ketahanan pangan di suatu negara atau wilayah tertentu.

Kerangka Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN adalah kerangka kerja komprehensif yang telah dikembangkan dengan tujuan untuk secara efektif mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Sebagai kesimpulan, teori ketahanan pangan memegang peranan penting dalam memahami dan mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan ketahanan pangan di berbagai negara dan wilayah. Negara-negara dapat berusaha keras untuk mencapai ketahanan pangan dan mempromosikan keberlanjutan berkelanjutan dari sistem pangan mereka dengan mengarahkan perhatian mereka pada elemen kunci seperti ketersediaan, aksesibilitas, dan pengelolaan pangan.¹⁶ Teori ini juga memperhitungkan aspek politik dan ekonomi dalam pengembangan ketahanan pangan.

Salah satu aplikasi utama dari teori ini adalah dalam memastikan ketersediaan bahan pangan di negara-negara berkembang, yang seringkali mengalami masalah gizi dan ketersediaan pangan.

Arti Ketahanan Pangan menurut para ahli¹⁷ sebagai berikut :

¹⁶ De Schutter, O. (2010). Agroecology and the Right to Food. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food.

¹⁷ Nurani Wityasari (2022). Pengertian Ketahanan Pangan Aspek, Tujuan dan Faktor yang Mempengaruhi. <https://ketahananpangan.probolinggokab.go.id/wp-content/uploads/2022/11/Pengertian-Ketahanan-Pangan.pdf>

1. United Nations' Committee on World Foods Security Komite PBB tentang Ketahanan Pangan Dunia, Ketahanan pangan adalah semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi preferensi pangan dan kebutuhan pangan mereka.
2. Food and Agriculture Organization (1997), Ketahanan pangan adalah sebagai suatu kondisi dimana semua rumah tangga memiliki akses secara fisik maupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.
3. Menurut Undang- Undang Nomer 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015, Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya akan menganalisis bagaimana teori ini menjelaskan ketahanan pangan di Indonesia melalui Kebijakan Impor Beras dari Vietnam.

2.3.3 Teori Rezim Internasional

Teori rezim internasional merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk mengartikan hubungan antara berbagai negara dalam kerangka sistem internasional. Fokus utama dari teori ini adalah bagaimana peran serta pengaruh rezim internasional berkontribusi

dalam membentuk perilaku negara-negara dalam berbagai isu seperti perdagangan, lingkungan, keamanan, dan hak asasi manusia.

Menurut Wendt¹⁸, esensi dari teori rezim internasional melibatkan pembangunan sosial dari dinamika politik kekuasaan. Wendt mengusulkan bahwa anarki dalam konteks sistem internasional tidaklah merupakan situasi yang tetap, tetapi bisa berubah melalui interaksi serta proses pembelajaran yang terjadi antara negara-negara. Rezim internasional memiliki kapabilitas untuk melampaui logika anarki apabila kondisi yang mendukung perubahan tersebut ada. Dalam pandangan ini, struktur sistem (termasuk anarki dan distribusi kekuasaan), proses (seperti interaksi dan pembelajaran), serta peran institusi semuanya berkontribusi dalam membentuk perilaku negara-negara.

Pendekatan lain datang dari Gilpin¹⁹, yang memberikan pemahaman tentang perubahan politik dalam konteks internasional. Gilpin berargumen bahwa perubahan dalam sistem internasional timbul karena adanya ketidakmerataan dalam pertumbuhan kekuasaan antara negara-negara. Ketika terjadi perubahan dalam keseimbangan kekuasaan, negara-negara yang memperoleh peningkatan kekuasaan cenderung ingin mengubah tatanan sesuai dengan kepentingan mereka. Perubahan semacam ini bisa melibatkan ekspansi wilayah, kebijakan politik, atau aspek ekonomi. Namun, perubahan tersebut akan berhenti ketika biaya dari perubahan melebihi manfaat yang diperoleh.

Dalam lingkup teori rezim internasional, terdapat juga sudut pandang realisme ofensif yang dikembangkan oleh Mearsheimer²⁰. Pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen dari realisme klasik Morgenthau dan realisme defensif Waltz. Menurut Mearsheimer, dorongan

¹⁸ Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391-425. <https://doi.org/10.1017/s0020818300027764>

¹⁹ Gilpin, R. (1981). War and change in world politics.. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511664267>

²⁰ Coogan, P. and Mearsheimer, J. (2002). The tragedy of great power politics. *The Journal of Military History*, 66(3), 916. <https://doi.org/10.2307/3093434>

negara-negara untuk meraih kekuasaan lebih besar dipengaruhi oleh struktur dari sistem internasional, bukan semata-mata oleh dorongan nafsu kekuasaan manusia.

Dalam perspektif ini, negara-negara cenderung menunjukkan perilaku ofensif untuk memelihara dan memperluas kepentingan serta kekuasaan mereka. Secara keseluruhan, teori rezim internasional melibatkan pembangunan sosial dalam kerangka politik kekuasaan, interaksi dan pembelajaran di antara negara-negara, serta perubahan dalam sistem internasional yang timbul dari pertumbuhan kekuasaan yang tidak merata. Rezim internasional memiliki kapabilitas untuk memengaruhi perilaku negara-negara dalam beragam isu dan mampu mengatasi logika anarki dalam sistem internasional ketika terdapat kondisi yang mengizinkan perubahan.

Dalam konteks kerjasama ketahanan pangan, teori ini digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana negara-negara di ASEAN bekerjasama dalam mengatasi masalah ketahanan pangan dan mencapai ketahanan pangan berkelanjutan.

Menurut penelitian oleh Quaralia²¹ (2022), kerjasama regional dalam rantai pasok pertanian di ASEAN dapat dijelaskan dengan menggunakan teori internasional rezim. Teori ini menggambarkan bagaimana negara-negara anggota ASEAN bekerja sama dalam membentuk dan menjaga kolaborasi dalam sektor pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di kawasan. Dalam konteks ini, rezim internasional dapat berperan dalam mengatur aturan dan mekanisme kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam hal pertanian dan keamanan pangan.

Teori ini dapat menjelaskan bagaimana negara-negara di ASEAN bekerja sama dalam mengatasi masalah keamanan pangan dan mencapai ketahanan pangan berkelanjutan melalui

²¹ Quaralia, P. (2022). Kerjasama regional dalam rantai pasokan pertanian untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan: studi kasus asean. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(1), 56. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i1.37614>.

pembentukan dan penjagaan kolaborasi dalam sektor pertanian. Selain itu, teori rezim internasional juga dapat menjelaskan bagaimana kerjasama di bidang keamanan pangan dapat berkontribusi terhadap stabilitas perdamaian di kawasan ASEAN.

